

Pengendalian Inflasi akan Membantu Selamatkan Daya Beli Masyarakat

Adrian Hidayat

ahnangka67@yahoo.com

Universitas Buddhi Dharma

ABSTRACT

Di Tahun 2021 adalah tahun yang penuh tantangan. Industri perbankan menghadapi tantangan fundamental yang cukup berat untuk melalui era pandemi yang sangat hebat. Banyak perbankan, juga debitur kredit yang kesulitan. Dengan sangat berat hati, agar trust (kepercayaan dan win-win solution), maka perbankan harus melakukan restrukturisasi kredit pada saat itu. Tidak ada seorangpun yang dapat memprediksi, ataupun memberikan obat yang manjur untuk keluar dari lingkaran Covid-19 ini. Yang pasti dampak pandemic ini sudah hamper 3 tahun, dan belum berakhir, namun dampak finansial – ekonominya sudah sangat terasa di Indonesia dan di seluruh dunia.

Seiring dengan perjalanan pandemi Covid-19 ini, dampak inflasi menjadi zona peperangan sendiri. Secara praktis, supply produk terganggu oleh karena beberapa pabrik berhenti produksi sampai ada yang tutup tidak bertahan. Hal ini ditambah dampak daripada perang Rusia – Ukraina yang belum juga usai. Hal ini sudah pasti akan membawa dampak perekonomian, yaitu inflasi dan terjadi dimana-mana di banyak negara dunia. Sehingga negara-negara di dunia juga sedang “berperang-memerang inflasi” di negaranya sendiri.

Oleh karenanya, “Pengendalian Inflasi akan Sangat Membantu Selamatkan Daya Beli Masyarakat”. Lebih cepat pengendalian Inflasi, dan merata seluruh Indonesia, dampaknya akan positif terhadap perekonomian masyarakat.

Keywords: Inflasi, Pandemi Covid-19, Krisis Ekonomi, Pengendalian Inflasi

PENDAHULUAN

Dunia seakan tak pernah habis dirundung masalah dalam tiga tahun terakhir ini. Dimulai dari Pandemi Covid-19, sampai pada tersendatnya rantai pasok/suplai global terganggu dalam tahap akut karena pembatasan ketat (lockdown) yang dilakukan hampir di semua negara. Tahun 2021, ketika perekonomian mencoba pulih dan keluar dari resesi, ternyata terdapat gejolak perang melanda Rusia dan Ukraina. Terlebih hal ini sangat mengganggu rantai pasok, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan pangan. Hal ini memiliki potensi daya beli masyarakat semakin menurun. Inflasi di berbagai negara mulai terjadi, termasuk di negara kita Indonesia.

Inflasi adalah suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

- Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI) : Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
- Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).
- Indeks harga produsen : Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
- Indeks harga komoditas : Indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
- Indeks harga barang-barang modal
- Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Inflasi

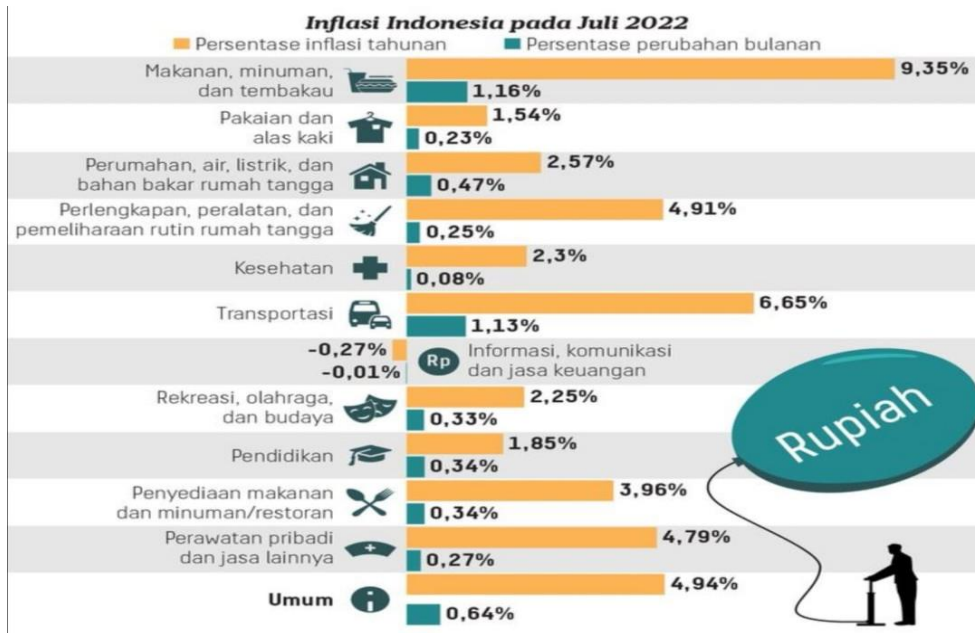
Menurut A. P. Lehner, Inflasi adalah suatu keadaan yang di mana sudah terjadinya kelebihan dari suatu permintaan atas barang-barang di dalam suatu perekonomian dengan cara menyeluruh.

Dalam konsep makroekonomi, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Sebagaimana ditulis Suseno dan Astiyah (2009), dalam konteks tersebut terdapat dua pengertian penting yang merupakan kunci dalam memahami inflasi yaitu kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut inflasi. Kenaikan harga pada komoditas tertentu yang terjadi karena faktor musiman, misalnya menjelang hari-hari besar atau karena gangguan supply sesaat dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan, tidak disebut inflasi.

Pengendalian Inflasi, Selamatkan Daya Beli Masyarakat

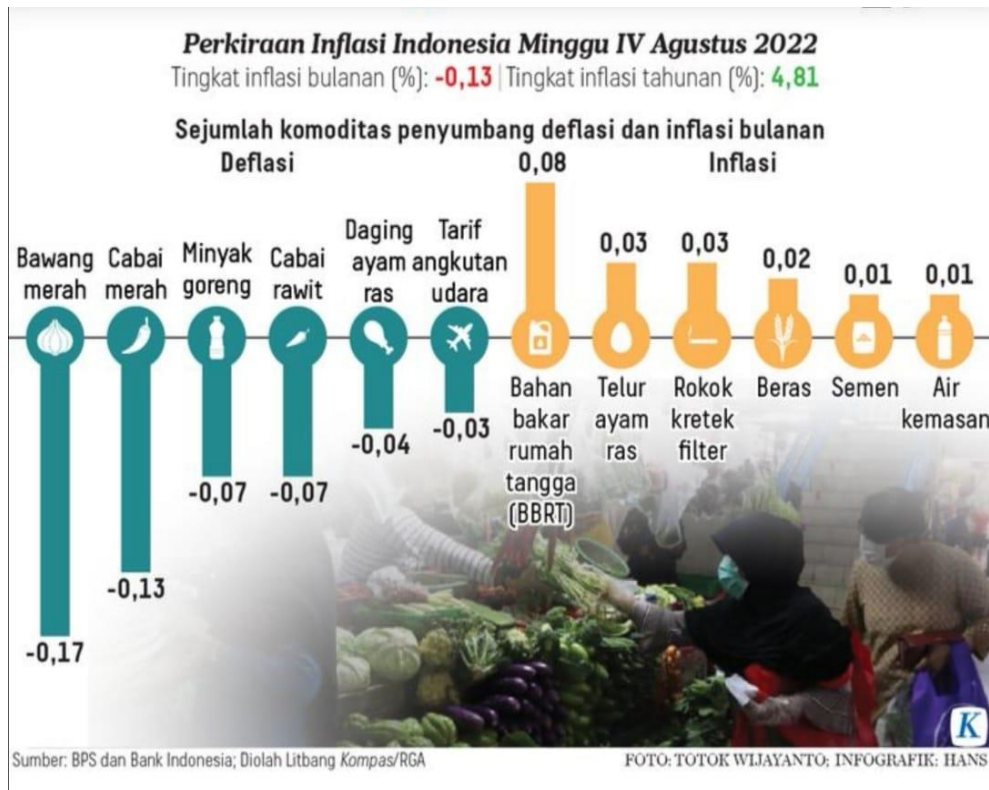
Kontribusi konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang inflasi terbesar di Indonesia, terlebih di saat hari raya. Komponen ini mendominasi terbentuknya produk domestik bruto atau

PDB nasional. Dengan kata lain, daya beli masyarakat menjadi kunci dalam menopang perekonomian nasional.



Gambar 1. Inflasi Indonesia pada Juli 2022

Terlihat dari paparan data tersebut diatas, bahwa penyumbang inflasi terbesar adalah dari berturut-turut; Makanan, minuman dan tembakau (9,35%), Transportasi (6,65%), Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (4,91%), Perawatan pribadi dan jasa lainnya (4,79%), Penyediaan makanan dan minuman/restoran (3,96%) dan seterusnya. Dimana secara rata-rata inflasi tahunan ada di kisaran 4,94%, yang berarti terjadi kenaikan inflasi tahunan sekitar 0,64%.



Gambar 2. Perkiraan Inflasi Indonesia Minggu IV Agustus 2022

Terlihat juga dari paparan data tersebut diatas bahwa di bulan Agustus Minggu ke IV, terjadi penurunan harga (deflasi) terhadap beberapa komoditas, seperti Bawang Merah (-0,17%), Cabai Merah (-0,13%), Minyak Goreng (-0,07%), Cabai Rawit (-0,07%), Daging Ayam Ras (-0,04%), Tarif Angkutan Udara (-0,03%). Namun hal ini di ikuti juga oleh kenaikan beberapa harga komoditas pangan seperti Bahan Bakar Rumah Tangga (0,08%), Telur Ayam Ras (0,03%), Rokok Kretek Filter (0,03%), Beras (0,02%), Semen (0,01%), dan Air Kemasan (0,01%).

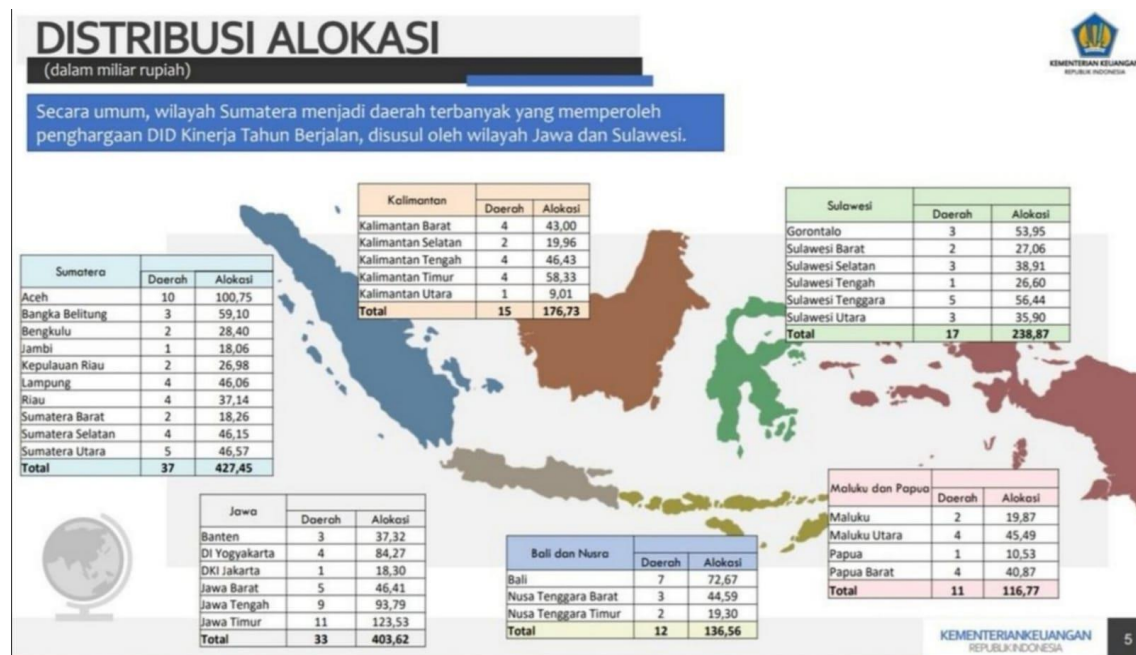
Dari data 2 gambar tersebut diatas, data inflasi bulan Juli 2022 (4,94%), dan inflasi bulan Agustus 2022 (4,81%), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa inflasi di dua bulan terakhir turun sebesar 0,13%. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi daerah sangat membantu meredam gejolak laju inflasi, sehingga daya beli masyarakat terjaga.

Dana Insentif untuk Pengendalian Inflasi

Tekanan terhadap daya beli masyarakat, terutama dengan adanya kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) per tanggal 3 September 2022 ini, akan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional di masa yang akan datang. Kenaikan harga minyak dunia memaksa pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah dengan segera mengantisipasi untuk memberikan BLT BBM (bantuan langsung tunai bahan bakar minyak), yang merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat kelas bawah agar dapat mengakses BBM secara tepat sasaran.

Adapun BLT BBM tersebut akan diberikan dalam kurun waktu empat bulan dan akan diberikan mulai September 2022.



Gambar 3. Distribusi Dana Insentif

Peran pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi daerah itu vital sekali. Disamping mampu mendeteksi potensi kenaikan harga pangan secara dini, pemerintah daerah juga mampu mengintervensi distribusi barang kebutuhan pokok.

Kementerian Keuangan mengucurkan dana insentif daerah dengan nilai total Rp. 7 triliun untuk kegiatan percepatan pemulihan ekonomi serta pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum, wilayah di Pulau Sumatera menjadi daerah terbanyak yang memperoleh penghargaan DID (Dana Insentif Daerah) kinerja tahun berjalan, disusul wilayah Pulau Jawa dan Sulawesi.

DISKUSI

Kepala Daerah Harus Aktif Bersama Atasi Inflasi

Daya beli masyarakat memegang peran kunci dalam menopang geliat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, secara seksama pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mengatasi tekanan inflasi yang ada. Pemerintah pusat telah mengucurkan dana insentif inflasi, yang dapat digunakan untuk meredam laju inflasi yang ada di daerah provinsi. Oleh karenanya Kepala Daerah diajak aktif bersama untuk mengatasi inflasi.

KESIMPULAN

- Pada tingkat yang rendah dan stabil, inflasi memberikan efek positif bagi perekonomian. Konsumen akan lebih mudah melakukan perencanaan konsumsi dan bergerak menabung karena daya beli tidak akan tergerus oleh inflasi. Inflasi yang rendah umumnya dibarengi suku bunga yang rendah, sehingga mendorong dunia usaha berinvestasi untuk peningkatan produksi yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang tinggi menimbulkan ketidakpastian sehingga mengurangi insentif untuk investasi dan konsumsi serta menggerus daya saing ekspor domestik. Inflasi yang tinggi juga menjadi masalah sosial karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah. Masyarakat kelas bawah merupakan golongan yang paling rentan terhadap inflasi karena pergerakan upah mereka relatif lambat. Karena itu, tak mengherankan jika sering terjadi aksi buruh menuntut kenaikan upah, karena kenaikan upah tidak bisa mengejar kenaikan inflasi. Dengan melihat dampak negatif inflasi yang tinggi tersebut, maka target untuk menciptakan inflasi yang rendah dan stabil hampir pasti menjadi tujuan dari setiap Pemerintah yang berkuasa.
- Pengendalian harga pangan memang menjadi hal yang krusial untuk mengendalikan inflasi supaya tidak terus melambung. Jika inflasi tinggi dapat diredam, artinya gejolak harga pangan dapat diatasi. Jika kebutuhan dasar ini teratasi, maka daya beli masyarakat dapat terjaga. Harapan baiknya adalah agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terjalin dengan baik, agar supaya gejolak harga pangan dan inflasi daerah dapat dijaga, dikendalikan bersama-sama.
- Pemerintah sudah melakukan secara optimal peran APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) sebagai peredam guncangan/gejolak inflasi, yaitu dengan sudah dilakukannya penyesuaian dan pengalihan sebagian subsidi dan kompensasi yang selama ini tidak tepat sasaran ke dalam program perlindungan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Achmadi, Abu & Cholid Narbuko. 2015. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Bank Indonesia. 2015. Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Oleh Gubernur Bank Indonesia. Disampaikan dalam Rakornas VI TPID di Jakarta 27 Mei 2015.
- Boediono. 2014. Ekonomi Moneter. Yogyakarta: BPFE.
- Lerner, A.P., *The Inflationary Process, Review of Economic and Statistic*. August.1959.
- Suseno dan Astiyah, Siti (2009), Inflasi. Buku Seri Kebanksentralan PPSKBI.
- Wijaya, Krisna. COVID-19 dan Bisnis Perbankan: Peran Kekinian Teknologi. Infobank. Januari 2021

- Wimanda, Rizki., Prasmuko, Andri & Oktiyanto, Fajar. 2011. Karakteristik Inflasi Indonesia: Sebuah Rangkuman Studi yang Komprehensif dan Pelajaran yang Dapat Dipetik Occasional Paper, Bank Indonesia No. OP/04/2011.
- Yanuarti, T. 2007. Has Inflation Persistence in Indonesia Changed?. Working Paper. Bank Indonesia, No. WP/10/2007.